

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA SURABAYA**

Iluh Nadila Rahma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
iluhnadila13@gmail.com

I Made Suparta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
madesuparta@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) on open unemployment rate in Surabaya City, motivated by the fact that fluctuations in unemployment are not aligned with the increasing allocation of DAU and DAK received by the local government each year. The research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis based on time series data from 2010-2024 obtained from Central Statistics Agency (BPS), Ministry of Finance, and the Surabaya City Government. The analytical tool used is Eviews. The results show that the General Allocation Fund (DAU) has a negative and insignificant effect on unemployment in Surabaya City, while the Special Allocation Fund (DAK) has a positive and insignificant effect on unemployment in Surabaya City. These findings indicate the need for the local government to optimize the use of General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) by directing them more toward job creation in order to reduce unemployment.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Open Unemployment, Surabaya.*

A. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan permasalahan signifikan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia tetapi oleh negara-negara di dunia, baik yang maju atau berkembang, sehingga pengangguran menjadi konflik yang luas. Pengangguran merupakan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, terlebih tingginya tingkat pengangguran berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat. Terlebih pengangguran di wilayah perkotaan menjadi masalah yang serius karena memiliki laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran diukur dari persentase jumlah penduduk yang menganggur di daerah tersebut (Setiyawati & Hamzah, 2007).

Menurut Kaji et al. (2024), pengangguran terbuka mengacu pada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran paksa, yang terjadi ketika seseorang ingin

bekerja tetapi tidak dapat menemukannya, atau pengangguran sukarela, yang terjadi ketika seseorang belum mendapatkan pekerjaan karena gaji atau pekerjaan tidak sesuai dengan keinginannya. Selain itu, beberapa orang terlalu malas untuk mencari pekerjaan atau bekerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengangguran terbuka mengacu pada angkatan kerja moderat yang mencari pekerjaan dan pengangguran.

Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, sekaligus menjadi kota terbesar kedua dan kota metropolitan setelah Ibu Kota DKI Jakarta serta ditetapkan sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur, membuat tingkat urbanisasi menjadi sangat tinggi yang menyebabkan adanya kenaikan pengangguran. Kota Surabaya memiliki tingkat pengangguran cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, sehingga menyebabkan Kota Surabaya menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang terus meningkat. Faktor-faktor pengangguran di Surabaya meliputi keahlian yang sangat rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat urbanisasi, dan adanya persyaratan lowongan kerja yang ketat (Utari et al., 2024). Hal ini masih menjadi masalah serius yang berdampak pada kemiskinan dan dapat menurunnya kualitas hidup masyarakat di Kota Surabaya (‘Izzah & Hertati, 2024).

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya 2020-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2010	6,84
2011	7,81
2012	5,27
2013	5,32
2014	5,82
2015	7,01
2016	7,01
2017	5,98
2018	6,01
2019	5,76
2020	9,79
2021	9,68
2022	7,62
2023	6.76
2024	4.91

Sumber: BPS Kota Surabaya (2025)

Berdasarkan Tabel 1 tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya selama 15 tahun yakni tahun 2010 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif. Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 9,79% dan 9,68%. Penyebab utamanya sangat berkaitan dengan dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mulai masuk ke

Indonesia pada Maret 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi besar besaran di Indonesia terlebih di Kota Surabaya, yang merupakan kota perdagangan dan jasa. Banyak sektor menghentikan operasi atau mengurangi tenaga kerja, sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan karyawan secara massal karena adanya penurunan permintaan yang signifikan. Selain itu, adanya pembatasan kegiatan (PSBB) menekan aktivitas ekonomi secara signifikan. Kondisi ini membuat angka pengangguran meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dengan kondisi ekonomi sebelum pandemi yang sudah melemah, yaitu perlambatan ekonomi tahun 2019, turunnya perdagangan global, penundaan investasi, ketidakseimbangan pasar kerja, serta perubahan struktur industri menyebabkan pasar tenaga kerja Kota Surabaya memasuki tahun 2020 dengan kondisi yang rentan. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 4,91%. Hal tersebut bisa terjadi karena perekonomian pascapandemi telah pulih sepenuhnya, aktivitas sektor perdagangan dan jasa kembali normal, investasi dan industri meningkat, kesempatan kerja baru bertambah, dan didukung oleh pertumbuhan UMKM serta berkat hasil dari optimalisasi aplikasi pencari kerja seperti ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) dan job fair di tingkat kampung. Selain itu, pulihnya perekonomian tak lepas dari adanya penerimaan yang diterima Kota Surabaya seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 33 (2004), sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi beberapa penerimaan salah satunya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pelaksanaan desentralisasi yakni tanpa ikatan tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kebutuhan daerah sesuai prioritas. Dengan pemberian otonomi kepada daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah serta menggali dan mengoptimalkan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal untuk membangun daerah sendiri dengan tidak semata mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar (Rizal et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 (2005) tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan di setiap pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) ialah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah (Rizal et al., 2021).

Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada wilayah daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah yang khusus antara lain pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana alam,

pemberantasan penyakit menular dan lain-lain (Ali & Ningsih, 2021). Besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima suatu daerah mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan juga menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Tabel 2 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya 2010-2024

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp Miliar)	Dana Alokasi Khusus (Rp Miliar)
2010	652,53	59,88
2011	679,26	49,87
2012	1.061,62	53,22
2013	1.160,02	29,92
2014	1.200,88	19,85
2015	1.147,38	7,12
2016	1.233,38	294,85
2017	1.211,71	378,49
2018	1.211,71	398,78
2019	1.254,34	380,38
2020	1.203,46	420,04
2021	1.167,15	384,14
2022	1.137,71	762,87
2023	1.231,07	765,02
2024	1.410,85	778,22

Sumber: Pemerintah Kota Surabaya (2011) dan Portal Data SIKD (2025)

Berdasarkan Tabel 2 realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya selama 15 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 1.410,85 M. Hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian formula Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, meningkatnya kebutuhan fiskal daerah, kenaikan belanja wajib seperti gaji ASN, serta penguatan kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat. Selain itu, meningkatnya pendapatan negara pascapandemi memungkinkan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar kepada daerah dengan skala layanan publik tinggi seperti Kota Surabaya. Sedangkan, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Surabaya paling sedikit terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 652,53 M dikarenakan pada tahun tersebut formula Dana Alokasi Umum (DAU) masih menggunakan skema lama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tinggi sehingga mengurangi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta kebutuhan fiskal daerah belum sebesar tahun-tahun berikutnya. Selain itu, kapasitas fiskal nasional pada 2010 masih dalam masa pemulihan ekonomi sehingga transfer pusat ke daerah relatif kecil.

Berdasarkan Tabel 2 realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya paling besar terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 778,22 M. Hal tersebut dapat

terjadi karena meningkatnya kebutuhan layanan publik kota metropolitan seperti pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, prioritas nasional untuk pembangunan infrastruktur dasar, serta kebijakan pemerintah pusat yang memperkuat transfer fiskal pascapandemi. Selain itu, kinerja daerah yang baik dan tingginya urgensi proyek fisik membuat Surabaya menjadi salah satu daerah prioritas penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar pada tahun tersebut. Sedangkan, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya paling sedikit terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 7,12 M karena pada tahun tersebut pemerintah pusat melakukan pengetatan dan penyederhanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam masa transisi kebijakan fiskal. Selain itu, Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal tinggi tidak menjadi prioritas utama penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), ditambah belum adanya skema Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik yang baru muncul setelah 2016.

Fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seharusnya ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk tingkat pengangguran. Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Surabaya, seharusnya semakin besar juga kemampuan daerah menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, sehingga berdampak pada turunnya tingkat pengangguran. Dengan fokus Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi dapat membiayai belanja wajib dan memperkuat pelayanan publik dan fokus Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tinggi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang rendah membatasi realisasi proyek dan mengurangi potensi penyerapan tenaga kerja menyebabkan tingginya pengangguran. Namun, fenomena empiris di Kota Surabaya tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten. Pada beberapa tahun, pengangguran masih meningkat meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan.

Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh DAU dan DAK terhadap pengangguran menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten antarwilayah. Dengan adanya fenomena fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Surabaya, ketidakkonsistenan hasil Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengangguran, dan terbatasnya penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Surabaya”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Teori Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menggunakan teori desentralisasi fiskal menurut Wallace E. Oates dalam bukunya *Fiscal Federalism* (1972) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah proses pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan fungsi-fungsi publik sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Oates (1972) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak akan berfungsi tanpa sistem transfer fiskal yang efektif. Transfer fiskal adalah aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk menutup kesenjangan antara tanggung jawab pengeluaran dan kapasitas pendapatan daerah. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan kepada daerah melalui beberapa mekanisme transfer, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 (2005) tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan di setiap pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah (Rizal et al., 2021).

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 (2005) tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada wilayah daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah yang khusus antara lain pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana alam, pemberantasan penyakit menular dan lain-lain (Ali & Ningsih, 2021).

Teori Pengangguran

Teori pengangguran menurut John Maynard Keynes pertama kali diperkenalkan dengan nama Teori Keynesian dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (Keynes, 1936) menjelaskan bahwa pengangguran muncul akibat kurangnya permintaan agregat, Keynes merekomendasikan kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan dan mengurangi pengangguran. Sehingga, peran pemerintah menjadi sangat penting melalui penerapan kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat dan pada akhirnya memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Menurut (Sukirno, 2019) dalam buku *Makroekonomi Teori Pengantar* terdapat empat jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu:

1. Pengangguran Normal atau Friksional

Ketika jumlah orang yang menganggur mencapai dua atau tiga persen dari seluruh populasi, ekonomi dianggap telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

2. Pengangguran Struktural

Disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi dengan kemerosotan struktur kegiatan ekonomi menyebabkan kegiatan produksi dalam industri menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi

penganggur.

3. Pengangguran Siklikal

Kemerosotan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Menurut (Sukirno, 2019) dalam buku Makroekonomi Teori Pengantar terdapat empat jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya.

4. Setengah Menganggur

Pekerja-pekerja yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja yang jauh lebih rendah dari yang normal. digolongkan sebagai setengah menganggur.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder *time series* periode 2010-2024 yang diperoleh dari web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Kota Surabaya. Analisis data dilakukan menggunakan EViews 12 dengan pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Model regresi yang digunakan adalah:

$$\text{Log}Y = \alpha + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \varepsilon$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 3 Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOG(PENGANGGURAN)

Method: Least Squares

Date: 12/01/25 Time: 10:15

Sample: 2010 2024

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.943631	2.023369	2.937493	0.0124
LOG(DAU)	-0.234703	0.299353	-0.784033	0.4482
LOG(DAK)	0.061601	0.042681	1.443287	0.1745
R-squared	0.151021	Mean dependent var	4.609312	
Adjusted R-squared	0.009525	S.D. dependent var	0.223044	
S.E. of regression	0.221979	Akaike info criterion	0.004388	
Sum squared resid	0.591296	Schwarz criterion	0.145998	
Log likelihood	2.967093	Hannan-Quinn criter.	0.002879	
F-statistic	1.067313	Durbin-Watson stat	1.245062	
Prob(F-statistic)	0.374439			

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 3 model persamaan regresi linier berganda yang terbentuk dari penelitian ini adalah:

$$\log(\text{Pengangguran}) = 5.9436 - 0.2347\log(\text{DAU}) + 0.0616\log(\text{DAK})$$

Sehingga dari persamaan regresi linier berganda menggunakan (Time Series) diatas dapat di jelaskan bahwa:

1. $\alpha = 5.9436$, yang berarti bahwa jika nilai X_1 (DAU) dan X_2 (DAK) masing-masing sebesar 0 (nol), maka nilai Y (Pengangguran Terbuka) sebesar 5.94%
2. $\beta_1 = -0.2347$, yang berarti bahwa jika variabel X_2 (DAK) dianggap konstan, maka jika variabel X_1 (DAU) meningkat 1%, maka Y (Pengangguran Terbuka) akan turun sebesar 0.23%. Artinya, semakin naik Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Surabaya, pengangguran akan turun meskipun besarnya pengaruh ini relatif kecil.
3. $\beta_2 = 0.0616$, yang berarti bahwa jika variabel X_1 (DAU) dianggap konstan, maka jika variabel X_2 (DAK) meningkat 1%, maka Y (Pengangguran Terbuka) akan naik sebesar 0.06%. Artinya, semakin naik Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya, pengangguran akan ikut naik.

Uji F (Simultan)

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,3744 > 0,05, yang menandakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh tetapi tidak cukup kuat

terhadap pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Uji t (Parsial)

Secara parsial, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien negatif sebesar $-0,2347$ dengan nilai probabilitas $0,4482 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung menurunkan tingkat pengangguran, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Surabaya lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dan operasional pemerintahan, sehingga tidak secara langsung berdampak pada penurunan pengangguran. Tetapi, sektor industri dapat berjalan dikarenakan meningkatnya efisiensi pelayanan publik, karena jika efisiensi pelayanan publik meningkat maka pelayanan perizinan cepat membuat usaha baru mudah dibuka dan dapat menambah lapangan kerja sehingga menurunkan pengangguran. Kemudian, dengan infrastruktur terpelihara membuat aktivitas ekonomi lancar karena perusahaan lebih mudah beroperasi.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien positif sebesar $0,0616$ dengan nilai probabilitas $0,1745 (> 0,05)$, yang berarti peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang umumnya diarahkan pada proyek fisik dan pengadaan bersifat jangka pendek serta tidak padat karya, sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif terbatas. Selain itu, tingginya urbanisasi ke Kota Surabaya menyebabkan tingkat pengangguran bertambah meskipun pemerintah meningkatkan belanja modal melalui DAK.

R² (Koefisien Determinasi)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,151$ menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya mampu menjelaskan $15,1\%$ variasi tingkat pengangguran, sedangkan sisanya yaitu $84,9\%$ dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, dan perkembangan sektor industri dan jasa.

Pembahasan

Secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0.2347 dengan nilai probabilitas $0.4482 > 0.05$. Hal ini berarti peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung menurunkan tingkat pengangguran, namun pengaruh tersebut tidak signifikan di Kota Surabaya. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mendukung belanja wajib dan pelayanan dasar, namun alokasi tersebut tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja baru yang cukup besar untuk memengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif fleksibel (block grant) membuat perannya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak secara langsung terasa pada tahun berjalan. Sehingga, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa penelitian saya sejalan dengan penelitian Ali & Ningsih (2021) di Kota Metro yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran dan penelitian Setiyawati & Hamzah (2007) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien positif sebesar 0.0616 dengan nilai probabilitas $0.1745 > 0.05$. Artinya, ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat, tingkat pengangguran justru cenderung meningkat meskipun efeknya tidak signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Surabaya sebagian besar digunakan untuk program fisik dan kegiatan yang sifatnya proyek jangka pendek. Misalnya, jika di Surabaya Dana Alokasi Khusus (DAK) sering digunakan untuk pembangunan infrastruktur ringan (jalan lingkungan dan bangunan sekolah), pengadaan alat kesehatan dan pengadaan alat pendidikan. Hal tersebut membuat lebih banyak menggunakan alat berat dan kontraktor, bukan tenaga kerja banyak serta waktu pengerjaan singkat. Selain itu, proyek pemerintah sering menggunakan tenaga kerja ahli, bukan pencari kerja lokal. Maka, pekerjaan yang dihasilkan dari proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat temporer sehingga tidak berdampak besar terhadap pengurangan pengangguran. Di sisi lain, dikarenakan tingkat urbanisasi yang tinggi membuat arus masuk tenaga kerja ke Surabaya tinggi menyebabkan tingkat pengangguran bertambah meskipun pemerintah meningkatkan belanja modal melalui DAK. Hal ini menyebabkan peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tampak seolah-olah berkorelasi positif dengan bertambahnya pengangguran, padahal hubungan tersebut tidak signifikan. Sehingga, ketidaksignifikanan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bahwa ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat, alokasi anggaran lebih banyak terserap pada proyek mekanis atau pengadaan (*capital expenditure*) yang tidak padat karya, sehingga tidak berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja langsung dalam jangka pendek yang dapat menurunkan pengangguran. Jadi, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam artian penelitian saya tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Secara simultan, nilai probabilitas $0.3744 > 0.05$, yang berarti secara bersama-sama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pengangguran di Kota Surabaya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, perkembangan sektor industri, jasa dan perdagangan.

Dengan demikian, hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa transfer fiskal pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum menjadi faktor dominan dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kota Surabaya sepanjang tahun 2010-2024.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengangguran terbuka di Kota Surabaya selama periode 2010-2024 menggunakan analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara

simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak secara langsung memengaruhi pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka, menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak secara langsung menurunkan pengangguran terbuka di Kota Surabaya.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka, menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menaikkan pengangguran terbuka di Kota Surabaya tetapi tidak secara langsung.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya perlunya mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke sektor padat karya, seperti industri kreatif, UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kegiatan pembangunan untuk penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran terbuka di Kota Surabaya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, urbanisasi, atau perkembangan sektor, agar model dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Izzah, Z., & Hertati, D. (2024). Implementasi Program Padat Karya dalam Pengurangan Pengangguran di Kota Surabaya : Sebuah Analisis. 6(1), 91–100.
<https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/316/130>
- 2005, P. N. 55 T. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Annual Review of Plant Biology, 35(2), 1–54. https://brill.com/view/journals/jra/35/2/article-p159_4.xml
- 33, U.-U. R. I. N. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004. 1–3.
- Ali, K., & Ningsih, N. W. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. Derivatif: Jurnal Manajemen, 15(1), 85–101.
- Bahtiar, S. (2024). General Allocation Fund (DAU) and Regional Fiscal Independence: Finding a Balance Point in Central-Regional Relations. Journal of Management, 3(2 SE-Articles), <https://myjournal.or.id/index.php/JOM/article/view/341> 821–835.
- BPS Kota Surabaya. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Agustus 2024. Berita Resmi Statistik, 14, <https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2023/12/16/335/kondisi-ketenagakerjaan-surabaya-agustus-2023.html> 1–12.

- BPS KOTA SURABAYA. (2025). KOTA SURABAYA DALAM ANGKA 2024.
- Holik, A. (2020). The Impact of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit-Share Fund on Unemployment. *Jejak*, 13(1), 43–68.
- Jamiel, H. N., Anwar, N., & Arifin, A. (2023). The Effects of Local Governmental Incomes, General Allocation Funding and Special Allocation Funding on Open Unemployment in West Java Province: A Panel Data Analysis from 2013 to 2020. *Proceeding ICMA-SURE*, <https://doi.org/10.20884/2.prociema.2023.2.1.7770> 2(1), 25.
- Kaji, D. R. L. A., Renggo, Y. R., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh pad, dau, dak terhadap pengangguran di pulau sumba. 10(2), 1–11. <https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/interprof/article/view/2289/1338>
- kementerian hukum dan Hak azasi manusia. (2014). Undang-undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lincoln Arsyad <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan and Co., Limited.
- Malau, P. L., Manik, D. V., Tobing, W. S. L., & Pulungan, W. R. (2023). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK), dan Dana. 3(3), 421 431.
- Najiba, M. I. A. (2023). The Effect Of Fiscal Decentralization On The Open Unemployment Rate In The Province Of DIY. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(01), 46–58. <https://doi.org/10.22219/jep.v21i01.20203>
- Oates, W. E. (2006). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. *Institutional Foundations of Public Finance*, October 2006, 165–189. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1nzfgfp.14>
- PP No 37 Tahun 2023. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023. Pengeloi,Aan Transfer Ke Daerah, 37(142608), 32.
- Rizal, Y., Iskandar, & Ritonga, D. W. (2021). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Surabaya, P. K. (2010). PEMERINTAH KOTA SURABAYA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2010. 2–3.

- Syahidin, S., & Jalil. M, A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162>
- Titi, K. L., Sisriatmaja, M. B., & Murgianto. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 2021. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7706>
- Trisnawati, N., & Adhivinna, V. V. (2015). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI DIY & JATENG (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY dan Jateng Tahun 2009-2013). 12.
- Utari, R. D., Widiyanto, M. K., & Puspiningtyas, A. (2024). Strategi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Surabaya Dalam Mengurangi Penganggurandi Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(02), 1–23.